

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT PEDESAAN ( *STUDI KASUS PADA BUMDES DI KABUPATEN  
MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT*).**

**Sunaryono**  
**Muhammad Salahuddin**  
**Zulka Sapta Dilla**  
[Sunaryono@yahoo.com](mailto:Sunaryono@yahoo.com)  
**Politeknik Putra Bangsa Pontianak**

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the existence of Village-Owned Enterprises (BUMDes) on community welfare. This research uses the Community Based Research method, which consists of 3 stages including: a. indepth interview stage with participants who are key actors in BUMDes, b. the stage of group discussion based on the interest groups in the village, and c. the FGD (Focus Group Discussion) phase where the discussion is carried out by all interested parties. All this was done to validate and verify the findings in the previous stage. The results of this study indicate the presence of BUMDes has had an impact on changes in the economic and social fields of rural communities. Although it has not been able to provide significant benefits for improving the welfare of villagers directly, it has slowly been able to provide solutions to several problems, especially related to the marketing of superior products and employment.*

**Key word:** Bumdes, Desa, Usaha, Masyarakat, Kesejahteraan

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, didefinisikan bahwa desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum desa harus bisa membangun diri agar bisa mandiri, salah satu bidangnya adalah pembangunan ekonomi yang dipelopori dengan keberadaan BUMDES yang sudah diatur dalam permendesa no 4 tahun 2015, dan diharapkan dengan keberhasilan usaha BUMDES yang ada didesa dapat menggerakkan perekonomian desa yang maju dan mensejahterakan masyarakat desa

Sejak dikucurkannya dana desa sejak tahun 2015, BUMDes merupakan salah satu prioritas kegiatan yang bisa didanai dengan dana desa demi

tercapainya kemajuan dan kemandirian desa, dengan adanya penelitian ini, peneliti akan menggambarkan sampai sejauh mana BUMDes yang ada dan didanai dengan dana desa tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, apakah keberadaan BUMDes memang memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan permasalahan apa saja yang mungkin ada dalam proses pengembangan BUMDes di desa

Berdasarkan permendes no 4 tahun 2015 tentang BUMDes disebutkan bahwa bumdes merupakan salah satu badan usaha yang memiliki beberapa unit usaha dibawahnya, unit usaha ini bisa berbentuk badan usaha atau tidak, karena bumdes merupakan badan usaha murni yang bertujuan menghasilkan laba sesuai dengan fungsi ekonominya maka keberadaan bumdes harus memiliki tujuan utama menghasilkan laba seperti halnya usaha umum lainnya. Hal ini tentu saja sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan unit usaha BUMDes yang ada di desa sehingga bisa menjalankan fungsi BUMDes yang kedua yaitu fungsi sosial.

Didalam PP Nomor 47 Tahun 2015 sudah disebutkan harus tercipta desa yang mandiri dan

otonom dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya, dan BUMDes harus memiliki peran yang penting dalam usaha untuk meningkatkan perekonomian di desa (Prabowo, 2014) sementara sumber daya manusia yang ada di desa sangat minim sekali sehingga potensi-potensi desa yang sangat banyak masih belum maksimal dimanfaatkan dan dikaji untuk dikembangkan, berdasarkan latar belakang diatas maka diperlukan adanya kajian yang menjelaskan pentingnya peran BUMDes dalam pengembangan perekonomian masyarakat desa yang pada akhirnya akan mampu memberikan kesejahteraan pada kehidupan masyarakat desa.

Kabupaten Mempawah merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan barat yang terdiri dari 60 desa dan 9 kecamatan, wilayah kabupaten mempawah yang sebagian besar berada di wilayah pesisir Kalimantan menjadikan wilayah ini memiliki beberapa potensi wisata desa yang berupa wisata pantai dan wisata mangrove. Masyarakat desa yang ada di kabupaten mempawah juga memiliki bidang usaha yang bervariasi, sebagian merupakan masyarakat petani, dan sebagian lagi berprofesi sebagai nelayan. Dengan adanya wisata desa yang maju diharapkan hasil-hasil pertanian dan hasil dari nelayan bisa dipasarkan lebih baik.

Berdasarkan penilaian status desa tahun 2018 (IDM 201) kabupaten mempawah sudah memiliki 14 desa mandiri dan sudah tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal, dengan status desa ini maka prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Permendes No. 11 tahun 2019 harus difokuskan kepada pengembangan ekonomi dan sumber daya manusianya, diharapkan dengan tercapainya pembangunan dibidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat bisa segera terwujud.

## TINJAUAN TEORETIS

Teori diperlukan sebagai dasar utama dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Resource Based View (RBV) dan Teori pemangku kepentingan (Stakeholder Theory), Secara lebih spesifik berdasarkan teori resource based view, maka desa harus memiliki sumber daya tersebut haruslah bernilai, langka, tidak disubstitusi, dan tidak diimitasi (Barney, 1991). Keunggulan kompetitif tersebut ditentukan oleh modal sosial, modal manusia, dan modal finansial (DeMassis et al., 2011). Sementara teori pemangku kepentingan adalah Teori yang menitikberatkan pada siapa yang memegang kekuasaan, legitimasi, dan mempunyai kepentingan (urgency) di dalam organisasi (Mitchell et al., 2011 dalam Kusuma, 2015). Dalam konteks riset ini, hal tersebut merujuk pada siapa yang

memegang kekuasaan dan legitimasi, memiliki kepentingan dan peran khusus dalam dinamika desa, menguasai pengetahuan serta sumber daya, dan memiliki kepentingan pada pembangunan ekonomi desa. Selanjutnya, dalam riset ini disebut sebagai key stakeholder desa.

Selain beberapa landasan teori diatas, penulis juga menjadikan beberapa regulasi sebagai landasan teori seperti UU No.6 tahun 2014 tentang desa dan Permendes & PDTT No.4 tahun 2015 tentang bumdes sebagai acuan dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes, dan terakhir terkait Permendes & PDTT No 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, dimana BUMDes merupakan salah satu prioritas yang harus dikembangkan untuk desa-desa yang sudah memiliki status maju dan mandiri sesuai dengan KepDirjen PPM No 201 tahun 2019 tentang status kemajuan dan kemandirian desa.

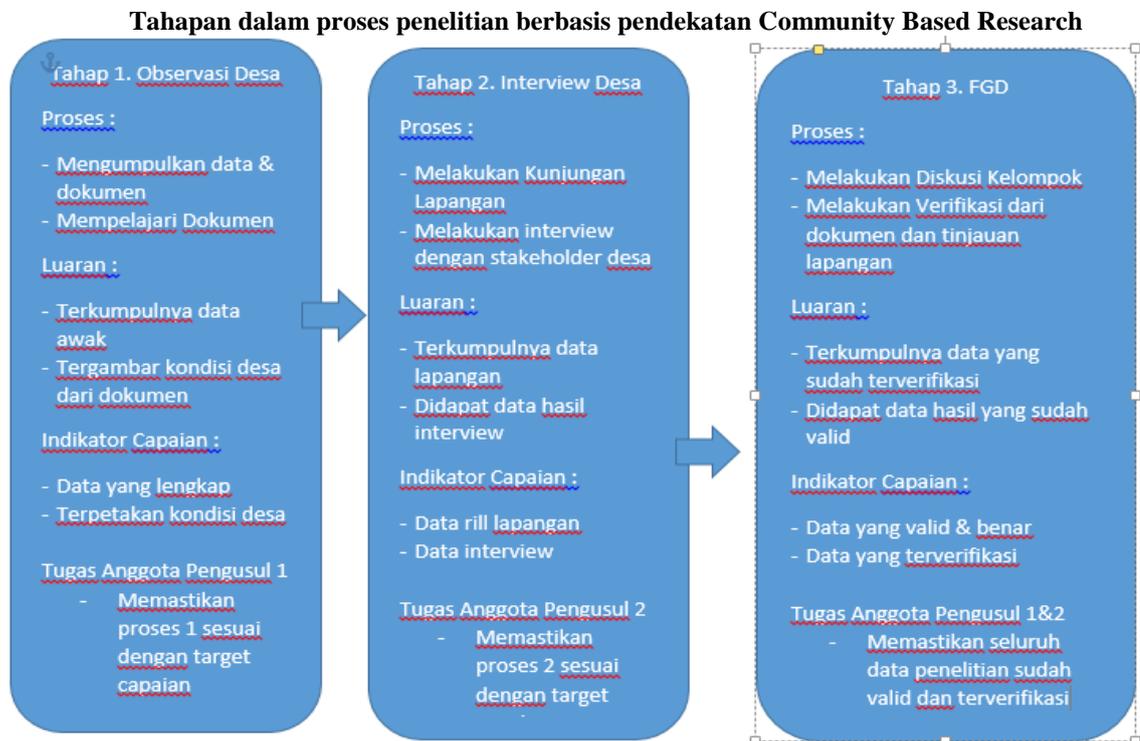
Kemudian beberapa penelitian sebelumnya juga menjadi dasar pambanding dalam penelitian ini, sehingga diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan dalam pengembangan BUMDes kedepannya

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Community Based Research yang dilakukan secara kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang luas dari masyarakat desa baik yang ada di tingkat mikro, meso, dan makro mengenai potensi desa secara keseluruhan, serta mengkaji arah dan motivasi pembangunan ekonomi perdesaan. Untuk memperoleh data dan informasi yang tepat, pengumpulan data makan dilakukan beberapa cara antara lain : a.) Observasi keadaan desa secara langsung maupun mempelajari dokumen-dokumen milik desa yang menjadi data sekunder, b.) Personal interview pada orang-orang kunci (key stakeholder) desa, c.) Group discussion dilakukan bersama kelompok-kelompok masyarakat yang berpengaruh seperti Pengelola BUMDes, PKK, kelompok tani dan nelayan, karang taruna, UMKM yang ada didesa, kelompok masyarakat difabel, dan kepala dusun, khusus untuk kegiatan FGD(Focus group discussion) akan dilakukan bersama perwakilan masing-masing anggota kelompok masyarakat dan lembaga desa. Hal ini dilakukan agar bisa melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang diperoleh dari langkah-langkah pengumpulan data sebelumnya. Penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis isi didefinisikan sebagai metode riset untuk interpretasi subyektif atas isi data melalui proses

klasifikasi sistematis dari pemberian kode dan pengidentifikasian tema atau pola (Wahyuni, 2012). Metode ini meringkas dan mengklasifikasi data dalam jumlah besar menjadi beberapa kategori yang

merepresentasikan arti yang sama (Weber (1990) dalam Wahyuni, 2012). Tahapan kegiatan dapat digambarkan dengan bagan berikut.



(Gambar 1 – Tahapan Kegiatan Penelitian )

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Pembahasan ini kami akan memberikan analisis terkait manfaat sosial dan manfaat ekonomi dari keberadaan BUMDes yang ada di desa yang pada akhirnya dihubungkan dengan perkembangan BUMDes dan Indeks Desa Membangun yang ada di kabupaten Mempawah

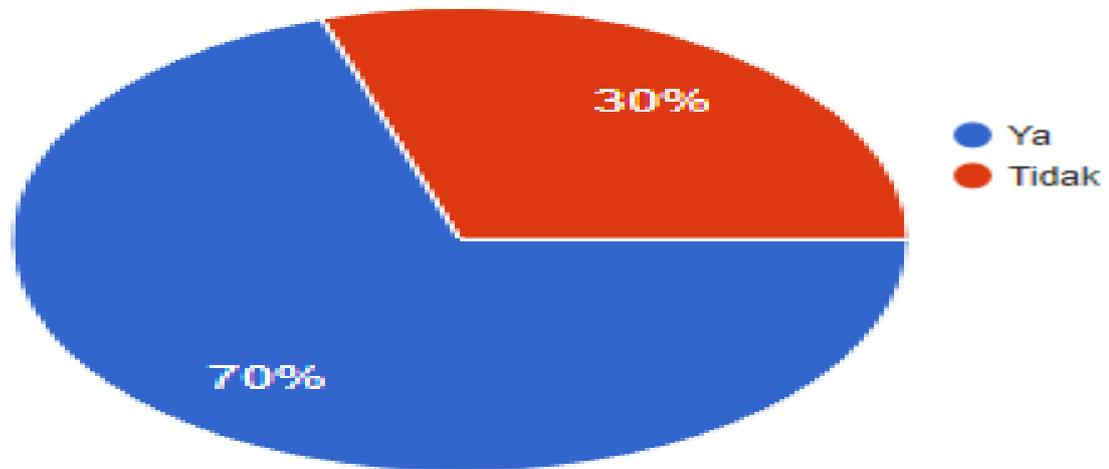
### A. Analisis Manfaat Sosial keberadaan BUMDes di Desa

Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Mempawah yang merupakan salah satu kabupaten dari 12 kabupaten yang ada di provinsi kalimantan barat, terdata ada sekitar 33 BUMDes yang ada di kabupaten mempawah, dan dari 33 BUMDes ini hanya 1 yang masih tercatat belum aktif, sementara 32 BUMDes lainnya sudah aktif dan sudah

mendapatkan penyertaan modal dari desa, adapun unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes ini terdiri dari beberapa macam unit usaha, mulai dari unit usaha wisata mangrove, penggilingan padi, peternakan ayam, sampai usaha jasa mulai dari penyewaan tenda, depot air minum dan LPG. Perkembangan BUMDes di kabupaten mempawah juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 sd 2019, tercatat ditahun 2015 baru ada 1, kemudian bertambah 6 ditahun 2016, 15 ditahun 2017, 9 ditahun 2018 dan baru 1 di tahun 2019.

Tahapan penelitian yang pertama setelah mendapat data awal adalah melakukan analisis dan survey terhadap manfaat keberadaan BUMDes dari segi sosial, dan dari hasil survey awal terkait peranan BUMDes yang dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada beberapa warga yang berada di sekitar BUMDes di kabupaten mempawah dapat dijelaskan dengan hasil berikut :

### Survey terhadap manfaat keberadaan BUMDes yang dirasakan oleh masyarakat desa



(Grafik 1 – Grafik Manfaat BUMDes )

Dari table diatas disimpulkan bahwa 70% dari masyarakat merasakan manfaat dari keberadaan BUMDes, manfaat tersebut antara lain : a.) Untuk desa wisata dapat membantu para pedagang, petani dan nelayan dalam memasarkan produknya karena banyaknya wisatawan yang datang ke desa mereka untuk berwisata sekaligus berbelanja. B.) dapat membantu warga seperti penyewaan tenda. C.) dapat membantu warga dalam memenuhi beberapa kebutuhan seperti air dan gas dengan adanya depot air dan pangkalan LPG.

Dari data survey tersebut kami lanjutkan dengan melakukan interview dan kunjungan langsung ke beberapa Bumdes yang ada di kabupaten mempawah, dari hasil kunjungan kami dapatkan beberapa masalah yang dihadapi bumdes antara lain a.) Banyak dari BUMDes yang didirikan di kabupaten mempawah belum didasarkan pada perencanaan usaha yang matang, sehingga unit usaha yang dijalankan dan mendapatkan modal dari desa untuk usaha tersebut tidak maksimal dalam menghasilkan keuntungan, tidak adanya perencanaan usaha atau bisnis plan ini menyebabkan pengurus juga tidak memiliki target bisnis yang tepat sehingga dalam pelaksanaan dan pengelolaanya juga tidak maksimal. b.) Minimnya sumber daya manusia yang ada di desa dan di kecamatan dalam dunia enterprenur dan bisnis, sehingga pengurus yang ada juga merasa kebingungan dalam mengelola unit usaha ada. c.) Belum maksimalnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa dengan tidak adanya laporan keuangan bulanan sederhana dalam bentuk laporan rugilaba sederhana yang dilaporkan oleh pengurus bumdes setiap bulannya.

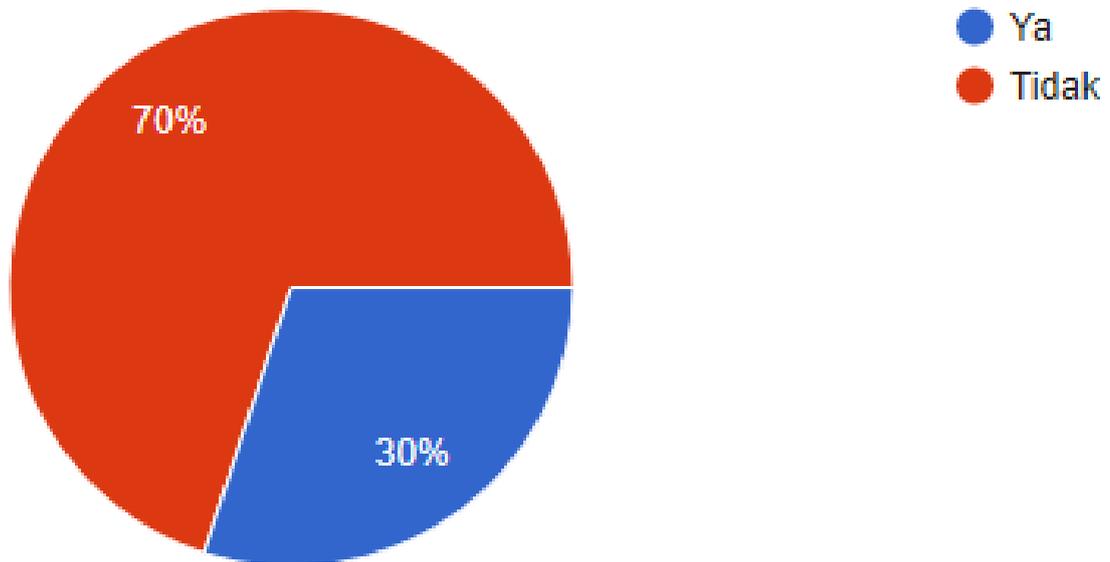
Dari beberapa masalah yang ada diatas, merupakan penyebab utama kenapa BUMDes yang ada Sekarang belum bisa menghasilkan laba yang maksimal untuk PAD dan untuk pengembangan usaha sementara keberadaan BUMDes tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan bumdes benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa tetapi manfaat yang ada tersebut tidak bisa dijamin keberlangsungannya karena tidak maksimalnya BUMDes dalam menghasilkan laba, jika laba yang dihasilkan tidak maksimal maka keberlangsungan usaha dari BUMDes juga tidak bisa dipastikan akan berlanjut, yang akhirnya akan menghentikan kegiatan operasional unit usaha BUMDes tersebut, sehingga seluruh manfaat sosial yang ada menjadi tidak bisa lagi dirasakan oleh masyarakat desa.

#### B. Analisis Manfaat Ekonomi keberadaan BUMDes di Desa

Hasil dari wawancara dan FGD dengan beberapa pihak yang ada di desa kami hubungkan dengan analisis terhadap peran BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dari hasil survey kami terhadap beberapa masyarakat terkait peran BUMDes dalam peningkatan penghasilan bagi masyarakat desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dibidang ekonomi didapatkan hasil sebagai berikut :

### Survey terkait peran BUMDes dalam memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat desa



(Grafik 2 – Grafik Peran BUMDes untuk menambah penghasilan masyarakat )

Dari table diatas dapat kita simpulkan bahwa, Keberadaan BUMDes belum memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan penghasilan rata-rata masyarakat desa, hal ini disebabkan karena BUMDes yang ada belum menghasilkan laba yang maksimal sehingga belum bisa mengembangkan usaha, dengan kata lain BUMDes yang ada masih kecil dan omzet yang dihasilkan masih dibawah 100 juta sehingga belum bisa dirasakan manfaat ekonominya secara nyata bagi masyarakat desa.

#### C. Analisis jenis usaha BUMDes yang sudah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa

Dari keseluruhan BUMDes yang ada di kabupaten mempawah, omzet terbesar baru ada di 3 BUMDes yang ada di kabupaten mempawah yang memiliki omzet diatas 100 juta per tahun, dan 3 BUMDes yang memiliki omzet antara 0 sd 100 juta rupiah per tahun. berikut adalah daftar desa-desa yang memiliki unit usaha dengan omzet diatas 100 juta rupiah per tahun ditahun 2018 dan 2019.

##### c.1. Bumdes Desa mendalok

Desa mendalok adalah salah satu desa yang ada di pesisiran Kalimantan barat, berada di

kecamatan sungai kunyit yang berbatasan langsung dengan laut, lokasi yang langsung berhubungan dengan laut ini menjadikan desa mendalok memiliki potensi dibidang wisata mangrove. Sejak didirikan pada tahun 2017, bumdes desa mendalok bergerak dibidang wisata mangrove, dengan omzet yang sudah mencapai angka diatas 300 juta rupiah ditahun 2018 ini sudah memberikan dampak peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa, baik dari segi peluang tenaga kerja, pemasaran produk-produk pertanian dan nelayan kepada pengunjung, terkait laporan keuangan yang sudah ada, dengan omzet sebesar ini BUMDes desa mendalok hanya bisa mencatat laba dibawah 10 juta rupiah.

##### c.2. Bumdes Desa Kuala Secapah

Desa kuala secapah berada di kecamatan mempawah hilir yang berbatasan langsung dengan ibukota kabupaten mempawah, dengan lokasi yang dekat dengan kota BUMDes desa kuala secapah memiliki beberapa potensi untuk menciptakan usaha yang langsung bisa di pasarkan di ibukota kabupaten. Sejak berdiri di tahun 2017, BUMDes desa kuala secapah sudah menghasilkan omzet diatas 100 juta ditahun 2019. Sempat mengalami kegagalan pada awal-awal berdirinya menjadikan

kepala desa dan pengurus BUMDes berfikir ulang dan mencoba kembali mengelola bumdes dengan unit usaha baru yang berbeda dari unit usaha sebelumnya.

Sejak tahun 2018, didirikan unit usaha baru yang bergerak dibidang peternakan ayam potong. Dan dengan sisa penyertaan modal dari unit usaha yang lama digunakan untuk membangun kandang ayam dan pembelian bibit dan pakan ayam, bumdes ini sudah menghasilkan omzet diatas 100 juta ditahun 2019, hanya saja laba yang dihasilkan dari omzet unit usaha ini belum maksimal, kemudian manfaat yang dirasakan langsung bagi masyarakat juga tidak terlalu tampak karena lokasi desa yang berada di pusat kecamatan dan kemudahan masyarakat dalam akses kepasar sehingga ayam yang dihasilkan oleh BUMDes dan ayam yang tersedia dipasar memiliki harga dan kualitas yang sama dan harga yang sama.

### **c.3. Bumdes Desa Sungai Batang**

Desa sungai batang berada di kecamatan sungai pinyuh dan berada didaerah pesisir, sejak tahun 2017, desa sungai batang sudah mulai menyertakan modal untuk unit usaha penggilingan padi, dan mulai 2018 pabrik penggilingan padinya sudah mulai beroperasi, selain pabrik penggilingan padi, desa ini juga mengembangkan budidaya lele yang lokasinya berada di belakang pabrik penggilingan padi. Sejak berdiri BUMDes desa Sungai Batang sudah berhasil menghasilkan omzet diatas 100 juta ditahun 2018, hanya saja dengan omzet yang lumayan besar BUMDes Sungai Batang hanya bisa membukukan laba dibawah 10juta rupiah ditahun 2018.

BUMDes sungai batang yang bergerak dibidang penggilingan padi dan budidaya lele masih belum dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa, keberadaan BUMDes dirasakan manfaatnya baru sebatas kemudahan dalam melakukan penggilingan padi untuk petani-petani yang ada di desa sungai batang, sementara manfaat ekonomi belum ada tampak dirasakan oleh masyarakat karena omzet yang masih kecil dan laba bersih dari unit usaha penggilingan padi yang masih relatif kecil.

### **c.4. Bumdes Desa Jungkat**

Desa jungkat berada di kecamatan siantan dan berada di lokasi yang dekat dengan ibukota provinsi ( Pontianak ), sejak tahun 2017, desa sungai batang sudah mulai menyertakan modal untuk unit usaha LPG dan PPOB, selain 2 unit

usaha ini BUMDes jungkat juga bergerak dibidang pengelolaan pasar yang sudah menghasilkan omzet puluhan juta rupiah, sementara untuk unit usaha LPG tidak berjalan maksimal karena keterbatasan quota dari pertamina, akibatnya LPG yang ada di BUMDes tidak bisa memenuhi kebutuhan LPG di masyarakat sehingga penghasilan BUMDes dari unit usaha ini juga belum maksimal.

Tidak adanya ketersediaan LPG yang cukup untuk kebutuhan warga desa menjadikan BUMDes di desa jungkat ini belum memberikan manfaat social dan ekonomi bagi masyarakat desa. Pihak desa dan kecamatan sudah melakukan beberapa usaha untuk menjadikan BUMDes jungkat ini menjadi salah satu panggalan gas LPG yang memiliki quota yang mencukupi untuk kebutuhan gas masyarakat desa.

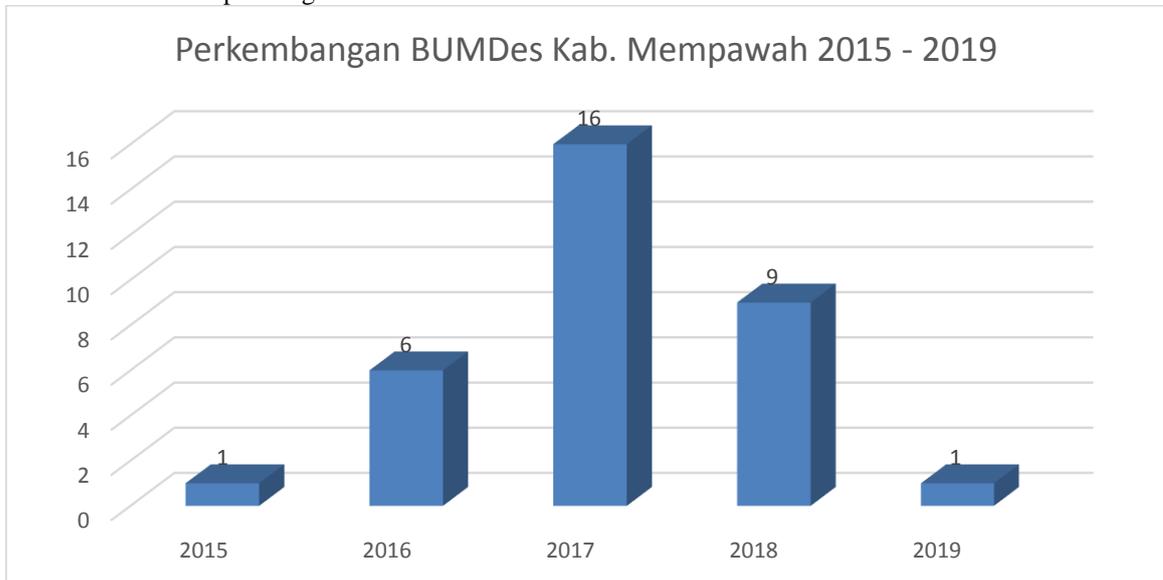
### **c.5. Bumdes Lain di kab. Mempawah**

selain 4 BUMDes diatas yang berpenghasilan diatas 100juta, Kemudian 10 BUMDes lain yang ada di mempawah masih belum menghasilkan omzet yang maksimal bahkan 19 BUMDes lain yang ada di kabupaten mempawah masih belum menghasilkan omzet ditahun 2018 sehingga bisa disimpulkan bahwa belum adanya manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan adanya BUMDes karena BUMDes yang ada masih belum mampu menghasilkan laba dan omzet yang maksimal sesuai dengan modal yang ada, beberapa BUMDes yang sudah berjalan dan menghasilkan omzet dan laba otomatis akan memiliki peran terhadap perekonomian masyarakat desa, dan kesejahteraan masyarakat desa akan benar-benar dirasakan jika unit usaha yang berjalan di BUMDes tersebut bergerak dibidang wisata desa.

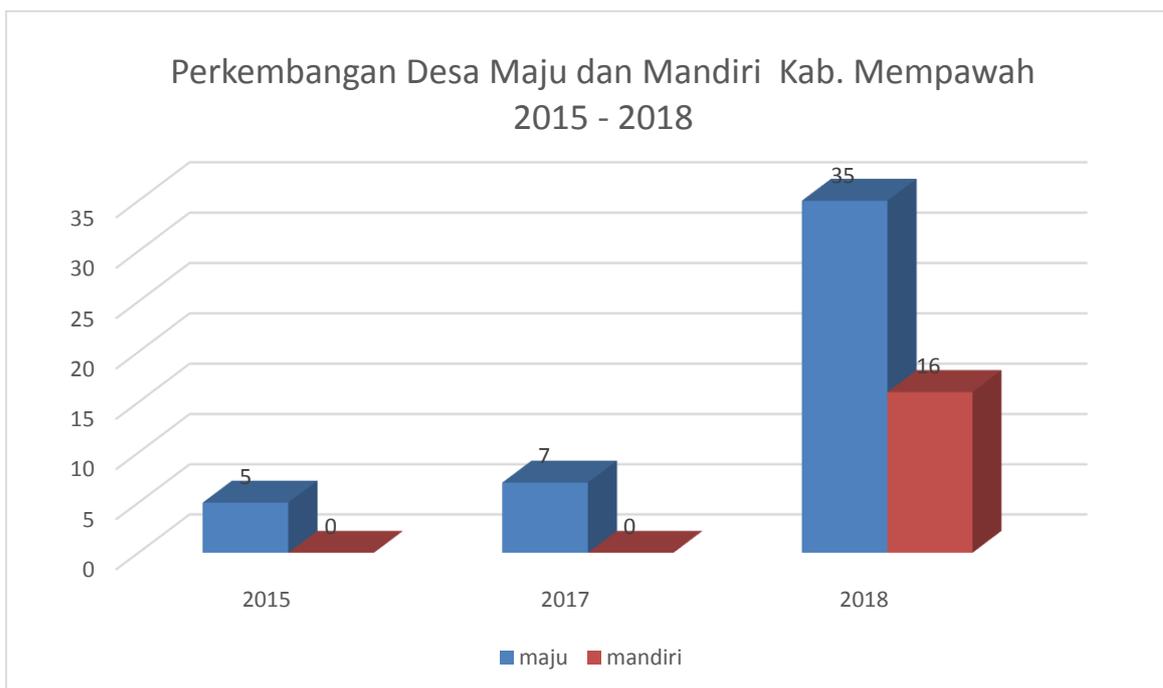
## **D. Analisis perkembangan BUMDes dengan Perkembangan IDM di Kabupaten mempawah**

Selain melakukan survey, interview dan FGD untuk menunjang hasil penelitian ini, kami juga membandingkan pertumbuhan BUMDes yang ada di kabupaten mempawah dengan peningkatan status desa yang ada di kabupaten mempawah. Berikut adalah perkembangan BUMDes di kabupaten mempawah dan perkembangan status IDM di kabupaten Mempawah, sumber dari ini adalah kepdirdjen PPMD No 30 tahun 2016, Kepdirjen PPMD No.52 tahun 2018 dan Kepdirjan PPMD No 201 tahun 2019 khusus untuk desa maju dan mandiri dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Berikut adalah grafik perkembangan BUMDes dari tahun 2015 sampai dengan 2019 :



( Grafik 3 – Pertumbuhan BUMDes di Mempawah)



( Grafik 4 – Pertumbuhan IDM Kab. Mempawah )

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan BUMDes memiliki peran dalam peningkatan IDM di kabupaten mempawah, walaupun baru sebatas peningkatan dalam hitungan kuantitas, tetapi diharapkan dengan adanya peningkatan status desa yang lumayan signifikan ini

dapat menjadi awal pengembangan BUMDes dari segi kualitas, diharapkan BUMDes yang ada benar-benar dijadikan Badan Usaha yang memberikan manfaat kepada masyarakat baik manfaat secara sosial maupun manfaat secara ekonomi.

Dengan status desa yang maju dan mandiri, berdasarkan permendesa & PDTT No 11 tahun 2018 akan menjadikan pembangunan desa berubah dari pembangunan yang bersifat infrastruktur menjadi pembangunan ekonomi dan manusia.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Dari ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes yang ada di desa akan memberikan manfaat ekonomi dan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat jika BUMDes tersebut menghasilkan omzet dan laba yang besar dan unit usaha yang benar-benar memiliki efek multidimensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah unit usaha BUMDes yang bergerak dibidang wisata desa.

Selain itu, BUMDes juga tetap akan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat walaupun tidak menghasilkan laba dalam kegiatan operasionalnya, tetapi akan menjadi masalah baru jika unit usaha yang memberikan manfaat sosial ini tidak menghasilkan laba akan menjadikan unit usaha ini tidak mungkin juga untuk bisa terus berlanjut dan bertahan, oleh karena itu apapun manfaat sosial yang bisa dirasakan oleh masyarakat, BUMDes sebagai salah satu badan usaha murni harus tetap menghasilkan laba untuk menjamin keberlangsungan usahanya.

Kemajuan dan kemandirian desa yang dinilai dengan IDM secara kuantitas memang berbanding lurus dengan perkembangan BUMDes, akan tetapi secara kualitas belum bisa dipastikan keberadaan BUMDes yang ada secara kuantitas itu benar-benar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, jadi intinya walaupun status desa tersebut maju atau mandiri jika tidak memiliki BUMDes yang menghasilkan omzet dan laba yang besar maka tidak akan memberikan peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Wahyuni, S. 2012. *Qualitative Research Method: Theory and Practice (Vol. 1)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Eko, S., et al. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Yogyakarta.
- De Massis, A., et al. 2015. Product Innovation in Family versus Nonfamily Firms: an Exploratory Analysis. *Journal of Small Business Management*. 53 (1): 1-36.
- Mitchell, R.K., et al. 1997. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. *The Academy of Management Review*. 22 (4): 853-886.
- Barney, J. 1991. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*. 17(1): 99-120.
- Prabowo, T.H.E. 2014. Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung Kidul Indonesia. *World Applied Sciences Journal 30 (Innovation Challenges in Multidisciplinary Research & Practice)*: 19-26.
- Kusuma, G.H. (2015). Metode Transfer Pengetahuan pada Perusahaan Keluarga di Indonesia. *Modus*. 27(2):125-139
- Arfianto, A.E.W. & Balahmar, A.R.U. 2014. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 2(1): 47-56.
- Eko, S., et al. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Undang-Undang No. 4 (Empat) Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendesa & PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Permendesa & PDTT No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Keputusan Dirjen PPMD No. 30 tahun 2016 tentang tentang status kemajuan dan kemandirian desa.
- Keputusan Dirjen PPMD No. 52 tahun 2018 tentang Perubahan pertama atas keputusan Dirjen PPMD No.30 tahun 2016 tentang status kemajuan dan kemandirian desa.
- Keputusan Dirjen PPMD No. 201 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas keputusan Dirjen PPMD No.30 tahun 2016 tentang status kemajuan dan kemandirian desa.